

PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL DAN PROSPEK PEMANFAATANNYA
(Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



oleh:
UTAMI ANGGRAINI
NIT. 15242899
Manajemen Pertanahan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I 1.PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kerangka Teoritis	5
1. Pendaftaran Tanah.....	5
2. Arsip dan Dokumen Pertanahan.....	6
3. Pengelolaan	8
4. Prospek dan Pemanfaatan.....	8
5. Kearsipan.....	9
6. Pengelolaan Arsip Di Era Digital.....	12
7. Penerapan <i>e-office</i> dalam mewujudkan <i>e-government</i>	13
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Pertanyaan Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Format Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian	17
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan	17
1. Informan	17
2. Teknik Penentuan Informan.....	18
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Teknik Analisis Data.....	20

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau	23
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau.....	24
1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	24
2. Pelayanan Pertanahan.....	25
3. Kondisi Arsip Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau	27
BAB V. PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL	29
A. Kondisi Warkah Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau	29
B. Faktor Pendukung Pengelolaan Warkah Digital	31
1. Sarana dan Prasarana.....	31
2. Sumber Daya Manusia (SDM).....	33
3. Anggaran	34
C. Proses Pengelolaan Warkah Digital	35
1. Instalasi dan Penyiapan <i>DataBase</i>	35
2. Penginputan Data Ke Aplikasi <i>i-Wak</i>	38
D. Proses Penggunaan (Peminjaman dan Pencarian).....	46
BAB VI. PROSPEK PEMANFAATAN WARKAH DIGITAL	49
A. Identifikasi Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>), Kelemahan (<i>Weaknesses</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>) dan Ancaman (<i>Threats</i>) Dalam Kegiatan Pengelolaan Warkah Digital Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau.	50
1. Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>)	50
2. Faktor Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	54
3. Faktor Peluang (<i>Opportunities</i>).....	55
4. Faktor Ancaman (<i>Threats</i>)	56
B. Strategi Pengelolaan Warkah Secara Digital Berdasarkan Strategi dalam Matriks SWOT	59
C. Prospek Pemanfaatan Warkah Digital berdasarkan Strategi SWOT.....	60
BAB VII. PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRACT

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency understand that the development of information and communication technology (ICT) today changes land services for the public due to land data which follows the development of the digital era. The ministry of ATR/BPN as a public servant requires a change in the current manual system used to store and manage land documents, which is called land tenure, which is considered ineffective and inefficient because requiring a lot of time and power to distribute document. Document search is difficult and requires a long time if the documents aren't stored appropriately. One of the land offices which have implemented digital land document management is the Land Office of Lubulinggau. The purpose of this study is to determine digital land document management and to determine the prospect of using it for land services. The research method in the present study was qualitative method with descriptive approach. The utilization prospect was analyzed by SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis.

Based on the research result digital land document management in the Land Office of Lubuklinggau used Land Document Information Application (i-Wak). The benefits of the application are as a media to store database, media to look for land document with 3D display and media to borrow and return land document. The utilization prospects of digital land document management were: first, relatively faster land document search than the manual system could improve public services. Second, it was a crosscheck of data on GeoKKP and documents in the archives. Third, human resources (HR) can be trained with certain program to manage land documents. Fourth, it could be strengthened by legislations on digital documents and management by the central government. Fifth, there was electronic land document application media with central database, which was electronic land document management system (SLOKA ETNIK).

Keywords: *digital land document management, land office, utilization prospect*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini telah berdampak pada perubahan-perubahan mendasar yang membawa pemerintah menuju paradigma baru memasuki era teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di era TIK ini, tidak ketinggalan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) merupakan salah satu Kementerian yang bergerak untuk melayani publik dalam hal memberikan informasi dan kepastian hukum mengenai tanah dengan wujud sertipikat tanah.

Kementerian ATR/BPN memahami perkembangan TIK saat ini turut membawa perubahan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, sehingga hal ini juga berkaitan dengan data pertanahan yang mengikuti era TIK. Kementerian ATR/BPN memahami digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Saat ini mengacu pada penerapan *e-government(e-gov)* untuk pelayanan publik yang berbasis elektronik. Menurut *The World Bank Group* (2001) dalam Habibullah (2010, 188) *e-gov* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good government*. Menurut Mustafadjaya (2003) dalam Habibullah (2010, 187), *e-gov* diperlukan karena jawaban atas perubahan lingkungan strategis yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, berorientasi pada publik, transparan dan akuntabel. Menurut Indrajit (2005, 20-22), *e-gov* dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik.

Transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital menjadi tema besar dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2019 yang diselenggarakan di Shangri-La, Jakarta pada Tanggal 6-8 Februari 2019. Menurut Djalil (2019) dalam www.atrbpn.go.id, saat ini banyak negara sedang bergerak cepat menuju transformasi era digital. Visi Kementerian ATR/BPN

adalah terwujudnya Kementerian ATR/BPN menjadi instistusi pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar dunia. Untuk menuju visi tersebut menurut Djalil (2019) dalam www.atrbpn.go.id, maka diterapkan 7(tujuh) pilar, yaitu: (1) Seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan; (2) Memaksimalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (3) Peningkatan Sumber daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia; (4) Kementerian ATR/BPN harus menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang; (5) Mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik; (6) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali dengan layanan informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara; (7) Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertananahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan.

Tuntutan perkembangan era digital membuat banyak orang menginginkan akses informasi yang efektif dan efisien, orang mengharapkan mereka mampu mendapatkan informasi tanpa harus menunggu lama ataupun melalui prosedur yang berbelit-belit dan tidak hemat waktu, biaya dan energi (Harries 2009, 20). Sugoto (2018) mengungkapkan bahwa kaitannya dengan data pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan suatu perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dijalankan untuk menyimpan dan mengelola dokumen pertanahan yang biasa disebut sebagai warkah pertanahan dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen.

Masalah lainnya yang sering dijumpai adalah terkait dengan penyimpanan dokumen dimana untuk menyimpan arsip dibutuhkan ruangan khusus untuk menyimpan arsip di kantor, tiap tahun permohonan pendaftaran tanah masuk membuat berkas yang masuk semakin meningkat sehingga menyebabkan ruangan menjadi sempit. Sementara itu dalam hal pencarian dokumen juga sulit dilakukan apabila dokumen tidak disimpan dengan teratur. Hal tersebut yang dialami oleh kantor pertanahan dengan banyaknya warkah pertanahan baik dari proses pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ditambah lagi dengan program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disetiap kantor pertanahan kabupaten maupun kota dengan

target yang sedemikian besar juga menghasilkan dokumen pertanahan yang banyak pula. Dokumen pertanahan pada saat ini baru $\pm 0,5$ % (persen) yang terdigitalisasi diseluruh Indonesia (Sugoto, 2018).

Warkah pertanahan merupakan dokumen pertanahan yang memuat data fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah baik kegiatan pendaftaran tanah pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Selama ini beberapa kantor pertanahan masih mengelola warkah pertanahan dengan sistem manual. Menurut Djalil (2019) dalam www.atrbpn.go.id, jika kita mengacu pada tema RAKERNAS 2019 bahwa nantinya seluruh dokumen pertanahan akan dikelola dengan cara digital. Keistimewaan dari warkah digital dibandingkan dengan warkah yang masih dikelola secara manual salah satunya adalah dalam pencarian warkah yang lebih hemat waktu dibandingkan dengan pencarian warkah secara manual serta penggunaan ruangan untuk penyimpanan warkah juga dapat diminimalisir.

Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kantor yang melaksanakan pengelolaan warkah secara digital. Pengarsipan dokumen pertanahan pada kantor ini pengelolaannya telah dilakukan secara digital dimulai pada Oktober 2018. Di tengah-tengah banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, sumber daya manusianya yang minim mampu bergerak dengan cepat untuk mengelola dokumen pertanahan secara digital. Menurut Nur Endro Sulistyono selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Lubuklinggau salah satu manfaat yang dirasakan dari kegiatan pengelolaan warkah secara digital tersebut antara lain adalah membantu penyelesaian pekerjaan lebih cepat dari biasanya, dimana untuk penyelesaian permohonan pendaftaran tanah biasanya sebelum pengelolaan warkah digital dapat selesai rata-rata per hari 20-30 berkas dan pasca pengelolaan warkah digital meningkat menjadi ± 50 berkas permohonan per harinya.

Pengelolaan kearsipan juga merupakan penunjang pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan (SPDP). Bukan hanya pengelolaannya saja

tetapi prospek pemanfaatan dari pengelolaan dokumen secara digital ini sangatlah penting untuk menuju pelayanan pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau)**”.

B. Rumusan Masalah

Sistem manual yang digunakan kantor pertanahan untuk mengelola warkah pertanahan dirasakan sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi karena membutuhkan banyak ruangan untuk penyimpanannya. Hal ini menyebabkan ruangan kantor menjadi sempit serta petugas kesulitan jika mencari arsip/dokumen pertanahan yang dibutuhkan karena tidak disimpan dengan teratur.

Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual. Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kantor yang telah melakukan pengelolaan warkah secara digital, tetapi belum diketahui bagaimana cara mengelolanya dan prospek pemanfaatannya di masa yang akan datang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau;
- b. Untuk mengetahui prospek pemanfaatan warkah digital untuk pelayanan pertanahan.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Menambah kajian tentang pengelolaan arsip berupa warkah digital serta prospek pemanfaatan dari warkah digital tersebut.
- b. Sebagai pertimbangan bagi kantor pertanahan kabupaten/kota tentang pengelolaan warkah digital.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan warkah secara digital yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dilakukan dengan menggunakan *database* sederhana tetapi saat ini seluruh dokumen belum tuntas terdigitalisasi karena masih terkendala beberapa faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran. Salah satu media yang digunakan untuk mengelola warkah secara digital adalah dengan Aplikasi i-Wak. Aplikasi tersebut memberikan manfaat antara lain sebagai media penyimpanan *database*, media pencari warkah, media peminjaman dan media pengembalian warkah.
2. Prospek Pemanfaatan yang diperoleh dari pengelolaan warkah digital dianalisis menggunakan matriks SWOT berdasarkan strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan Strategi W-T diperoleh manfaat sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Strategi S-O (Kekuatan dan Peluang), pertama bahwa dengan adanya pencarian warkah yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan hal ini juga mampu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan di kantor pertanahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mampu meningkatkan PNBPN dan hal ini sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN 2019. Kedua, data yang telah diinput dalam aplikasi warkah digital secara tidak langsung merupakan suatu kegiatan kroscek data yang ada di Aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di ruang arsip, sehingga warkah yang ada menjadi sinkron satu sama lain dan meminimalisir penggandaan dokumen.

- b. Berdasarkan Strategi W-O (Kelemahan dan Peluang), prospek pemanfaatan yang diperoleh adalah bisa dilakukan pelatihan SDM dengan program tertentu untuk pengelolaan warkah yang berbasis digital hal ini dapat meningkatkan kapasitas kinerja pegawai di bidang pertanahan.
- c. Berdasarkan Strategi S-T (Kekuatan dan Ancaman), perubahan bentuk dokumen pertanahan dari *paper based* menjadi bentuk elektronik agar tidak merubah kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan dapat diperkuat dengan peraturan mengenai dokumen digital maupun pengelolaannya oleh pemerintah pusat.
- d. Berdasarkan Strategi W-T (Kelemahan dan Ancaman), prospek manfaatnya adalah jika menggunakan *server* lokal sederhana maka bisa di *upgrade* kapanpun dan mudah dalam perbaikan *database*, tetapi sekarang sudah ada media aplikasi warkah elektronik dengan *database* terpusat yaitu SLOKA ETNIK yang diterbitkan oleh Pusdatin.

B. Saran

1. Perlu diberikan suatu pelatihan maupun program tertentu bagi SDM yang menangani pemeliharaan warkah secara digital pada tiap-tiap kantor pertanahan, serta perlu adanya suatu pengawasan berjenjang yang melekat dari setiap unsur SDM yang ada di lingkungan kantor pertanahan untuk terus mengawasi pemeliharaan warkah dan perlu adanya alokasi anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan warkah secara digital.
2. Perlu diusulkan kepada Pusdatin untuk dikeluarkan surat edaran bahwa pada setiap kantor pertanahan kabupaten/kota wajib melakukan digitalisasi warkah dengan menggunakan Aplikasi yang baku dari Pusdatin yaitu SLOKA ETNIK, agar setiap kantor pertanahan dapat seragam dalam menggunakan media pengelolaan warkah secara digital.

3. Perlu diusulkan kepada pembuat Aplikasi i-Wak untuk mengembangkan lagi fitur di Aplikasi i-Wak agar dapat terkoneksi dengan Aplikasi GeoKKP yang sudah ada di kantor pertanahan sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurlilita, 2015, *Prospek Usaha Pertamina Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Abdullah, Reza, dkk, 2017, *Kuliah Kerja Nyata Pertanahan (KKNP) Dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (PTLP) Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Akademik 2016/ 2017*, STPN Yogyakarta.
- Aprianty, Diah Rachma, 2016, *Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4.4.
- Bhatnagar, Subhash, 2002, *E-government: Lesson from Implementation In Developing Countries*, UNCRD Autumn, Vol.24.
- Pemerintah Kota Lubuklinggau, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau, 2017, *Sekilas Tentang Kota Lubuklinggau*, dilihat pada 17 Mei 2019, <http://lubuklinggaukota.go.id/public/static/6/Geografis>.
- Djalil, Sofyan, 2019, *Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, 6-8 Februari.
- Farhansyah, Raden Muhammad, 2015, 'Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Warkah Pendaftaran Tanah Secara Digital Menggunakan *Php Framework* Dan *Mysql*', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Freddy, Rangkuti, 2017, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis, cara perhitungan Bobot, Rating dan Ocai*, Cetakan Ke duapuluh tiga, PT. Gramedia, Jakarta.
- Gunawan, Imam, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Habibullah, Achmad, 2010, 'Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, FISIP, Universitas Jember, Vo.3 No.3, Hal:187-195
- Harries, S, 2009, 'Managing records, making knowledge and good governance', *Records Management Journal*, 19(1), 16-25.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Hendro, MM, 2011, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Indrajit, ER, 2005, *E-government In Action*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Indrajit, Ricahrdus Eko, 2009, *E-government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kementerian ATR/BPN, 2019, *Transformasi Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital*, dilihat pada 13 Februari 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/transformasi-kementerian-atrbpn-menuju-era-digital-80625>.
- Lakona, Hasni, 2017, Pemanfaatan Koleksi Terbitan Berkala Pada UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo Kendari, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2. No.1
- Lubis, Yamin dan Lubis, Rahim, 2012, *Hukum pendaftaran tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Luturmas, Frangkly Marthen, 2017, 'Sistem Pengelolaan Kearsipan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat', *Tesis Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik*, Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustafadidjaya, AR, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sankri Lan, Jakarta.
- Noviani, Gita Dwi, 2018, 'Pengelolaan Dan Jaminan Keamanan Arsip Vital Di Notaris Mintarsih Natamihardja,SH', *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pratama, Aditya Bagus, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Media Press, Surabaya.
- Prayitno, Agus, Safitri Yulia, 2015, 'Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis', *Jurnal* Vol. 1 No. 1, [Lppm3.bsi.ac.id/jurnal](http://lppm3.bsi.ac.id/jurnal).
- Putranto, Widiatmoko Adi, 2017, 'Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna', *Jurnal* Vol. 1 No. 1 September 2017.
- Ramawati, Ni Made Indra, Pascarani, Ni Nyoman dewi & Supriliyani, Ni Wayan, 2015, 'Penerapan *e-office* Dalam Rangka Mewujudkan *e-government* (Studi Kasus: Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali)', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Reed, B, 2010, 'Service-oriented architectures and recordkeeping', *Records Management Journal*, 20(1), 124-137.
- Rifauddin, Machsun, 2016, 'Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi', *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(2), 168-178.

- Satria, Ridho Julian, 2018, 'Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2008, *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*, Mandar Maju, Bandung.
- Silmi, Sikka Mutiara, 2004, *Panduan Menulis Surat Lengkap*, Absolut, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabet, Bandung.
- Sugoto, Himawan Arief, 2018, Transformasi Bidang Pelayanan Publik Pada Kementerian ATR/BPN, Disampaikan pada kuliah umum program studi Diploma IV STPN, pada tanggal 30 November 2018.
- Turyono, 2015, 'Pengelolaan Usaha Pertambangan', *Skripsi Fakultas UMP*, Purwokerto.
- Zarnuji, Muhammad, 2015, 'Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Untuk Pengelolaan Gambar Ukur (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara)', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang- Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional .